

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, Salah satu Dimensi pemerintahan yang demokratis adalah adanya keterlibatan aktif dari warga negara di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi pemerintahannya, ada tuntutan untuk memenuhi akuntabilitas sosial di dalam menjalankan tanggung jawab mengelola negara (McGee & Gaventa, 2010: 24). Media sosial, sebagai salah satu platform komunikasi yang paling dominan, telah menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan mendapatkan umpan balik dari publik (Indrawan et al., 2023: 172-173). Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi dua prinsip yang sangat penting dalam komunikasi pemerintah melalui media sosial.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan semakin diperkuat dengan adanya media sosial. Dengan memanfaatkan platform ini, pemerintah dapat memfasilitasi dialog dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat dan umpan balik yang konstruktif. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warganya.

McGee dan Gaventa menyatakan bahwa akuntabilitas sosial berhasil meningkatkan keterlibatan warga negara (publik) dalam melakukan kontrol kepada jalannya pemerintahan, sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat positif dari akuntabilitas publik meliputi: (1) peningkatan responsivitas pemerintah atau institusi; (2) menurunkan korupsi; (3) membangun ruang demokratis baru untuk pelibatan masyarakat; (4) pemberdayaan suara lokal; dan (5) penggunaan anggaran dan penyaluran layanan publik yang lebih baik (McGee & Gaventa, 2010: 45).

Ciri khas dari akuntabilitas sosial adalah adanya keterlibatan aktif kelompok masyarakat atau warga negara (*citizen*) untuk memberikan usulan

bagi kebijakan publik, melakukan monitoring implementasi kebijakan publik, meminta penjelasan kepada implementator kebijakan publik, dan melakukan advokasi terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Rodiyah et al., 2021: 23). Akuntabilitas sosial mencerminkan relasi kekuasaan antara penguasa (pemerintah) dengan warga negara, dengan demikian akuntabilitas sosial merupakan bagian dari kerangka hubungan pengelolaan pemerintahan yang demokratis (Iskandar, 2017: 30).

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam membangun akuntabilitas sosial dan keterlibatan warga negara adalah adanya transparansi informasi publik. Derajat keterbukaan akses informasi merupakan salah satu pilar yang menopang akuntabilitas sosial, di samping tiga pilar yang lain, yaitu derajat kemauan politik pemerintah untuk melibatakan warga negara, derajat kapabilitas kelompok warga masyarakat, dan konteks lingkungan dan budaya (Yang & Callahan, 2005: 199).

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam komunikasi publik, hal ini berarti bahwa pemerintah harus mampu menjelaskan kebijakan, program, dan anggaran dengan jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat (Maranjaya, 2022: 935). Melalui media sosial, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menjawab pertanyaan serta kekhawatiran masyarakat secara langsung. Di sisi lain, adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyampaian informasi. Pemerintah yang transparan tidak hanya menyediakan informasi yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat (Rosidah et al., 2023: 150). Media sosial memberikan platform yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi tersebut secara *real-time*, sehingga masyarakat dapat tetap *up to date* mengenai kebijakan dan aktivitas pemerintah.

Dengan demikian, peran media sosial dalam komunikasi pemerintah menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat akan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Membangun akuntabilitas dan transparansi melalui media sosial tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi

juga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Ulfiyyati et al., 2023: 436).

Namun, meskipun media sosial menawarkan peluang besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, masalah penyebaran informasi yang salah (hoaks), pengelolaan citra publik, dan perlunya kebijakan yang jelas dalam penggunaan media sosial oleh pejabat pemerintah (Alim, 2024: 5). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan etis dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memegang peranan strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kinerja kementerian ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan kementerian menjadi suatu keharusan. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi antara instansi dan masyarakat juga perlu dioptimalkan guna meningkatkan keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta memperkuat citra kelembagaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak hanya memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai platform digital seperti jobfair.kemnaker.go.id dan pelatihan.kemnaker.go.id (*Skillhub*) sebagai sarana layanan publik. Melalui situs ini, masyarakat dapat mengakses informasi bursa kerja, lowongan terbaru, hingga mengikuti pelatihan vokasi secara gratis. Salah satu program terbaru adalah Pelatihan Vokasi berbasis *Project-Based Learning* (PBL) yang berorientasi pada praktik nyata dan terhubung dengan kesempatan magang. Program ini mencakup bidang strategis seperti *Smart Farming*, *Smart Manufacturing*, *Smart Office*, *Smart Supply Chain*, *Smart Building*, dan *Smart Tourism*.

Selain itu, Kemnaker juga menyiapkan skema pelatihan tambahan seperti Sertifikasi Ahli Produktivitas. Kerja sama internasional pun digalakkan,

misalnya dengan Pemerintah Austria di BPVP Banyuwangi dalam bidang pariwisata dan pengelasan (welder), lengkap dengan pembangunan workshop, kurikulum standar internasional, dan pelatihan instruktur. Untuk memastikan kualitas, sejak 30 Juni 2025 diberlakukan Permenaker No. 6 Tahun 2025, yang mewajibkan setiap pelatihan memiliki Nomor Identifikasi Vokasi (VIN) serta instruktur bersertifikat kompetensi metodologi.

Di sisi lain, Kemnaker juga aktif memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui Job Fair Nasional yang digelar secara rutin. Pada tahun 2025, seri pertama dilaksanakan pada 22-23 Mei di Gedung Kemnaker RI, Jakarta Selatan, dengan tema “Optimalisasi Talenta Unggul untuk Indonesia Emas 2045”. Job fair ini menghadirkan lebih dari 52 ribu lowongan kerja, terdiri dari 17.847 lowongan offline dan 34.629 lowongan online melalui platform digital. Selain pameran lowongan kerja, tersedia pula layanan *walk-in interviews*, talkshow, konseling karier, hingga TKM Expo. Acara ini terbuka gratis untuk umum, dengan syarat peserta memiliki akun SIAPKerja serta membawa CV saat menghadiri lokasi.

Tabel 1.1 Jobfairs 2025

No	Nama Acara / Lokasi	Tanggal / Waktu	Lokasi / Penyelenggara
1	Job Fair Nasional- Kemnaker RI	22-23 Mei 2025	Gedung Kemnaker, Jakarta Selatan
2	Job Fair Samarinda (BPVP Samarinda & SCP)	10 Mei 2025	Atrium Lt.1, Samarinda Central Plaza
3	Job Fair Samarinda (Lobby Hotel Mercure)	25–26 Juni 2025	Lobby Ballroom, Hotel Mercure Samarinda
4	Job Fair Jakarta Pusat Gelombang I	12–13 Maret 2025,	Mall Thamrin City, Jakarta Pusat
5	Job Fair Jakarta Utara (Disnaker Jakut)	5 Maret 2025	Kota Administrasi Jakarta Utara

6	Job Fair Jakarta Pusat Gelombang II	6 Mei 2025	Jakarta Pusat
7	Career Expo Kepulauan Seribu	15 Mei	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8	Job Fair Cirebon (Disnaker Cirebon)	23 Juli 25	Kota Cirebon, Jawa Barat
9	Solo Career Expo 2025	23 Juli 25	Kota Surakarta, Jawa Tengah
10	Job Fair “Jakarta goes to Vocational School”	24 Juli 25	DKI Jakarta (tingkat sekolah kejuruan)

(Sumber Jobfair.kemnaker.go.id 2025)

Tabel 1.2 Pelatihan 2025

No	Jenis Pelatihan	Deskripsi	Lokasi / Platform	Keterangan Tambahan
1	Pelatihan Vokasi PBL (Project-Based Learning)	Pelatihan gratis berbasis proyek nyata, dilengkapi praktik langsung & magang.	Platform Skillhub & Balai Pelatihan	Bidang: <i>Smart Farming, Smart Manufacturing, Smart Office, Smart Supply Chain, Smart Building, Smart Tourism.</i>
2	Sertifikasi Ahli Produktivitas	Sertifikasi untuk meningkatkan produktivitas SDM nasional.	Pusat sertifikasi Kemnaker	Target awal 500 peserta (Agustus 2025).
3	Pelatihan Vokasi Internasional (Kerja Sama Austria)	Bidang pariwisata & pengelasan	BPVP Banyuwangi	Termasuk pembangunan workshop,

No	Jenis Pelatihan	Deskripsi	Lokasi / Platform	Keterangan Tambahan
		(welder), dengan kurikulum standar Austria.		pelatihan instruktur, dan peralatan modern.
4	Pelatihan Vokasi Reguler	Program pelatihan berbasis kompetensi di BLK/BBPVP.	Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia	Terintegrasi melalui SIAPKerja, wajib memiliki VIN (Nomor Identifikasi Vokasi).

(Sumber Skillhub.kemnaker.go.id 2025)

Dalam konteks akuntabilitas publik, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen ini memuat informasi tentang indikator kinerja strategis, realisasi anggaran, serta capaian program yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

LAKIP berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban institusional sekaligus alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja kementerian. Melalui laporan ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja kementerian, serta mengevaluasi sejauh mana anggaran negara digunakan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyajian informasi publik secara akuntabel menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintahan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan dokumen resmi yang disusun oleh setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pencapaian kinerja yang telah direncanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP mengacu pada prinsip good governance, yakni tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, efektif, dan efisien.

Dalam era digital saat ini, keberadaan media sosial sebagai kanal komunikasi publik membuka peluang besar untuk menyebarkan substansi LAKIP secara lebih luas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Penyajian konten-konten informatif yang merujuk pada data LAKIP melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dapat menjadi sarana edukasi publik yang efektif mengenai capaian kerja pemerintah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kelembagaan. Dengan demikian, pengintegrasian informasi dari LAKIP ke dalam komunikasi publik digital tidak hanya menunjukkan transparansi kinerja, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Dalam konteks Kementerian Ketenagakerjaan, LAKIP memuat berbagai informasi strategis yang mencakup indikator kinerja utama, realisasi program dan anggaran, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Dokumen ini menjadi alat penting untuk mengukur seberapa jauh kementerian mampu menjalankan program-program strategis seperti pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan pekerja, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Selain itu, LAKIP juga merupakan mekanisme kontrol internal dan eksternal yang mendorong setiap unit kerja untuk bekerja berdasarkan target kinerja yang terukur dan bertanggung jawab secara administratif maupun publik. Dengan diterbitkannya LAKIP secara terbuka dan dapat diakses masyarakat, maka publik memiliki dasar data yang objektif untuk menilai kinerja kementerian, sekaligus menjadi bentuk transparansi atas penggunaan

anggaran negara. Hal ini sejalan dengan mandat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP, yang menegaskan pentingnya pelaporan berbasis hasil (*result-based reporting*) dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berikut capaian LAKIP 2024:

Tabel 1.3 Capaian LAKIP 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	65	62	95,40%
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	80	78	97,50%
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan	85	84	98,80%
Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Diawasi	75	72	96,00%
Meningkatnya Tata Kelola Internal	Nilai Reformasi Birokrasi	85	84	98,80%

(Sumber ppid.kemaker.go.id 2025)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanfaatkan platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, Web untuk mengedukasi masyarakat tentang kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, serta peluang kerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang efektif memegang peran penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan produktif, terutama di tengah dinamika pasar tenaga kerja yang terus berubah. Salah satu pendekatan

strategis yang semakin ditekankan adalah penguatan pelatihan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri, guna menjembatani kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan permintaan pasar. Berikut media sosial kemnaker:

Tabel 1.4 Nama Akun Platform Kemnaker

PLATFORM	NAMA/AKUN RESMI
Instagram	@kemnaker
Instagram	@pusatpasarkerja
Twitter/X	@Kemnaker
YouTube	PUSDATIK KEMNAKER
Website	kemnaker.go.id
Website	satudata.kemnaker.go.id

(Sumber data diolah peneliti tahun 2025)

Dengan membekali angkatan kerja khususnya generasi muda dan lulusan baru dengan keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan, peluang kerja pun dapat meningkat secara signifikan. Namun, agar kebijakan ini berdampak optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum serta membuka akses pelatihan yang merata. Ketika pelatihan vokasi terintegrasi dengan kebutuhan sektor industri dan difasilitasi melalui regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, maka pencari kerja tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan kerja, tetapi juga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Namun, untuk memastikan efektivitas komunikasi tersebut, diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Hal ini penting agar masyarakat dapat menilai sejauh mana informasi yang disampaikan sesuai dengan realisasi anggaran dan capaian program.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung transparansi informasi publik dan pengelolaan data ketenagakerjaan. Selain itu media sosial yang di kelola oleh kemnaker di payungi oleh Keputusan Menteri nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di

Kementrian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemnaker, yang mewajibkan setiap instansi untuk menyusun laporan kinerja secara periodik dan dapat diakses oleh publik. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi anggaran maupun hasil yang dicapai. Selain itu, Kemnaker juga aktif dalam menyebarkan informasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan partisipasi publik dalam sektor ketenagakerjaan.

Fenomena penggunaan media sosial oleh pemerintah, termasuk Kemnaker, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam komunikasi publik. Platform seperti Instagram dan TikTok memungkinkan penyampaian informasi yang lebih kreatif dan interaktif, sementara YouTube menyediakan ruang untuk konten edukatif yang lebih mendalam. Sedangkan Web bertujuan untuk menampilkan regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh kemnaker. Penggunaan media sosial ini tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan dua arah dengan masyarakat, menerima masukan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengelolaan yang profesional dan etis agar tidak menimbulkan misinformasi atau persepsi negatif di masyarakat.

Dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat, Kemnaker dituntut untuk terus menjaga akuntabilitas dalam menyampaikan informasi. Komunikasi publik yang dilakukan melalui media sosial harus didukung dengan data yang valid dan berbasis pada laporan kinerja serta pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, transparansi informasi tidak hanya menjadi keharusan normatif dalam regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini akan menjadi modal sosial penting dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan inklusif.

Kementerian juga diwajibkan untuk mempublikasikan informasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran. Ini mencakup rincian alokasi anggaran untuk berbagai program ketenagakerjaan, serta laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan. Dan juga Setiap tahun, kementerian menetapkan indikator kinerja program yang harus dicapai. Misalnya, pada tahun 2023, terdapat sasaran program terkait penyediaan rekomendasi kebijakan berbasis data dan informasi ketenagakerjaan dengan target tertentu. Capaian dari indikator- indikator ini harus dilaporkan secara terbuka untuk memberikan gambaran jelas mengenai kinerja kementerian dalam mencapai tujuannya.

Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan program-program ketenagakerjaan. Melalui mekanisme umpan balik dan survei kepuasan layanan, kementerian dapat memperoleh masukan dari pengguna layanan tentang kualitas data dan informasi ketenagakerjaan yang disediakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membantu kementerian dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam komunikasi publik yang efektif, terutama dalam konteks pemerintahan. Dalam bidang ketenagakerjaan, pencari kerja membutuhkan informasi yang tidak hanya cepat dan menarik secara visual, tetapi juga memiliki kejelasan serta dapat dipertanggungjawabkan secara substansi. Informasi seperti lowongan kerja yang dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) seharusnya berasal dari sumber yang valid, mencantumkan syarat-syarat yang akurat, serta menyertakan prosedur pelamaran yang jelas dan dapat diverifikasi.

Namun, dalam praktiknya, sering kali informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah hanya bersifat promosi atau satu arah. Konten semacam ini tidak selalu disertai dengan keterbukaan data, kejelasan sumber informasi, maupun saluran umpan balik dari masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam membangun kepercayaan publik, karena rendahnya transparansi dapat memicu keraguan atas kebenaran informasi,

sementara kurangnya akuntabilitas mengurangi legitimasi komunikasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah yang perlu menyampaikan informasi secara terbuka, tetapi juga harus tersedia ruang untuk umpan balik dari pihak-pihak terkait, termasuk sektor swasta. Perusahaan swasta sebagai penyedia lapangan kerja memiliki peran penting dalam memberikan informasi aktual kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), seperti data lowongan kerja yang tersedia, kualifikasi yang dibutuhkan, serta perkembangan kebutuhan tenaga kerja industri. Umpan balik ini sangat penting agar informasi yang disebarluaskan Kemnaker melalui media sosial maupun platform digital lainnya tetap akurat, relevan, dan sesuai dengan dinamika pasar kerja.

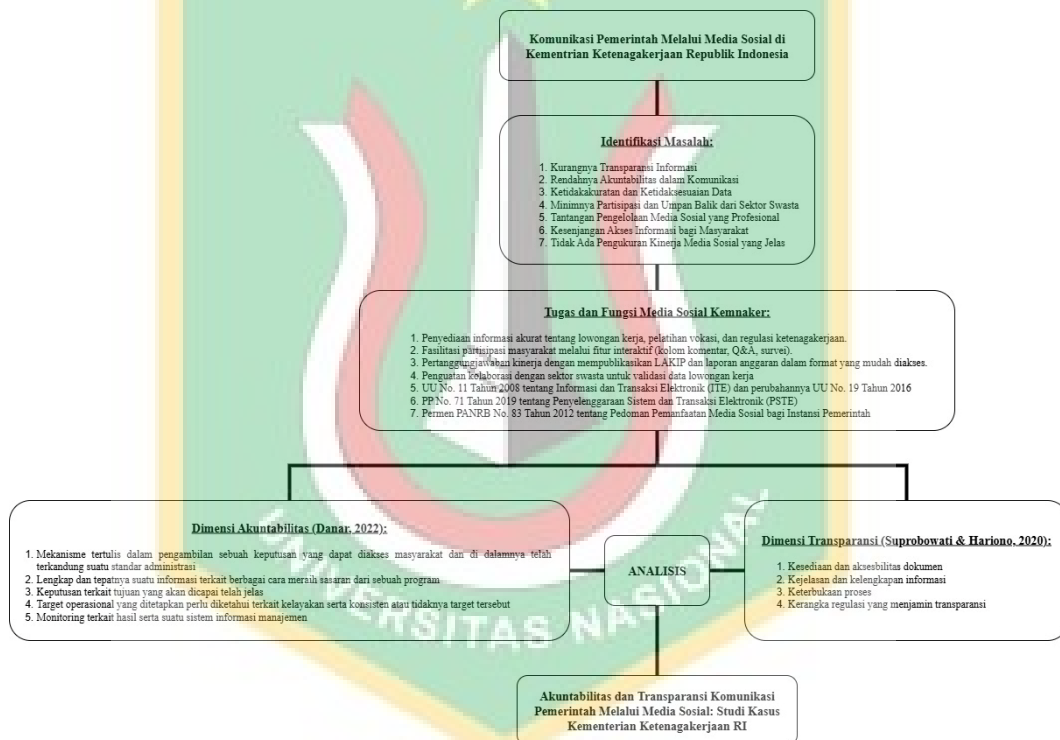
Tanpa adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan sektor swasta, informasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan berisiko menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan riil industri. Lebih dari itu, kurangnya sinergi bisa menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap data yang disampaikan, karena pencari kerja bisa saja menemukan ketidaksesuaian antara informasi yang diterima dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaporan dan koordinasi yang lebih terstruktur agar pihak swasta dapat secara aktif memberikan masukan dan pembaruan data kepada Kemnaker secara berkala.

Dengan mengintegrasikan umpan balik dari sektor swasta, Kemnaker tidak hanya meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada pencari kerja, tetapi juga memperkuat praktik transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola komunikasi publik. Hal ini akan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih responsif, partisipatif, dan terpercaya di mata masyarakat luas, khususnya kalangan muda yang sangat bergantung pada informasi digital.

Mengingat pentingnya peran media sosial dalam menyebarkan informasi ketenagakerjaan, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana Kemnaker telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasinya. Penelitian ini menjadi krusial untuk menilai apakah informasi

yang disampaikan benar-benar membantu pencari kerja secara efektif, atau justru menyisakan kesenjangan informasi dan persepsi negatif terhadap kinerja komunikasi publik pemerintah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, serta penggunaan anggaran kepada publik secara terbuka dan jujur. Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dalam era digital, media sosial memainkan peran penting sebagai saluran komunikasi strategis yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media sosial, seperti yang dimanfaatkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pemerintah tidak hanya dapat menyampaikan informasi, tetapi juga menerima masukan, keluhan, serta aspirasi dari masyarakat. Hal ini memungkinkan terwujudnya pengawasan publik yang lebih aktif dan responsif. Oleh karena

itu, pemanfaatan media sosial harus dikelola secara profesional dan etis, dengan memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dan transparansi bukan hanya menjadi kewajiban normatif, melainkan juga menjadi kebutuhan dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan pemerintahan yang terpercaya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui berbagai program, seperti Bursa Kerja Online, Job Matching, dan Job Fair. Namun, efektivitas program-program ini sering kali dipertanyakan karena kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen, khususnya terkait konfirmasi dari pihak swasta mengenai status lowongan kerja dan penerimaan tenaga kerja. Dalam praktiknya, banyak perusahaan terutama UMKM dan start-up tidak secara aktif melaporkan lowongan kerja atau memberikan umpan balik kepada Kemnaker setelah proses rekrutmen selesai. Akibatnya, data ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah sering kali tidak akurat, kadaluarsa, atau bahkan tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Sementara itu, perusahaan besar dan BUMN cenderung lebih patuh melaporkan lowongan kerja, terutama jika terlibat dalam program pemerintah. Namun, setelah proses rekrutmen, mereka jarang mengonfirmasi hasilnya kepada Kemnaker kecuali diminta secara khusus. Hal ini menimbulkan kesenjangan data, di mana Kemnaker tidak memiliki informasi real-time mengenai berapa banyak pencari kerja yang benar-benar terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas atau insentif yang memadai bagi perusahaan untuk melaporkan rekrutmen semakin memperparah masalah ini.

Di lapangan, masih ditemukan berbagai persoalan terkait implementasi program-program Kementerian Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau kawasan dengan tingkat akses informasi yang rendah. Misalnya, sejumlah program pelatihan kerja, pemagangan, hingga bantuan subsidi upah masih

belum diketahui secara luas oleh masyarakat karena keterbatasan penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kementerian dalam menyosialisasikan program-program strategis masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas informasi maupun kanal penyampaiannya.

Selain itu, keterbukaan informasi publik mengenai ketenagakerjaan, seperti data lowongan kerja, pelatihan berbasis kompetensi, hingga laporan penggunaan anggaran program, belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat. Banyak pekerja dan pencari kerja mengaku kesulitan memperoleh informasi resmi yang akurat dan terkini, sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi komunikasi publik melalui media sosial, laman resmi, dan layanan informasi lainnya yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Bagi pencari kerja, informasi yang tidak jelas atau tidak dapat diverifikasi dapat menimbulkan kebingungan bahkan kerugian, seperti jatuh pada informasi palsu atau lowongan kerja fiktif. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam penyampaian informasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui media sosial dan laman resmi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat, khususnya para pencari kerja, adalah valid, relevan, dan terkini.

Selain itu, di tengah kondisi pasar kerja yang semakin kompetitif dan cepat berubah, pencari kerja khususnya generasi muda dan lulusan baru membutuhkan informasi ketenagakerjaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Mereka bergantung pada media digital dan media sosial untuk memperoleh informasi mengenai lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta regulasi ketenagakerjaan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, keberadaan media sosial sebagai kanal komunikasi resmi pemerintah menjadi sangat krusial.

Keterbukaan data mengenai ketersediaan lowongan kerja, kebutuhan industri, kualifikasi tenaga kerja, hingga program pelatihan yang dapat meningkatkan daya saing pencari kerja, menjadi kebutuhan mendesak. Para

pencari kerja tidak hanya memerlukan informasi administratif, tetapi juga membutuhkan panduan strategis berbasis data dalam mengambil keputusan karier. Oleh sebab itu, efektivitas komunikasi publik Kemnaker tidak hanya berimplikasi pada citra institusi, tetapi juga berperan langsung dalam memperbesar peluang kerja dan mengurangi pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif.

Namun, akun media sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menghadapi tantangan serius terkait akuntabilitas dan transparansi. Seringkali, pertanyaan atau keluhan masyarakat di kolom komentar atau pesan langsung tidak direspons dengan memadai, menimbulkan kesan bahwa Kemnaker enggan bertanggung jawab. Informasi mengenai kemajuan atau dampak kebijakan yang diumumkan di media sosial pun kerap luput dari pembaruan, membuat publik sulit melacak realisasi janji. Lebih lanjut, penjelasan atas keputusan penting atau kontroversial seringkali kurang mendalam, memicu lebih banyak pertanyaan daripada klarifikasi. Aspek akuntabilitas juga terganggu karena ketiadaan pengukuran kinerja media sosial yang jelas, serta respons yang kurang proaktif terhadap disinformasi atau hoaks yang beredar.

Sementara itu, transparansi di media sosial Kemnaker juga masih minim. Informasi yang disajikan seringkali bersifat sepihak, tidak membuka ruang bagi diskusi atau pemahaman yang lebih dalam mengenai proses di balik kebijakan. Publikasi data dan statistik penting pun kurang disajikan secara visual dan mudah diakses, atau tautan ke sumber resmi tidak selalu disertakan. Ketika ada kebijakan baru, media sosial cenderung hanya mengumumkan hasilnya tanpa menjelaskan latar belakang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kritik dari masyarakat juga seringkali tidak direspons dengan penjelasan transparan mengenai bagaimana masukan tersebut akan dipertimbangkan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap Kemnaker dapat menurun drastis, menyebabkan kesalahpahaman, dan pada akhirnya, mengurangi partisipasi masyarakat dalam isu-isu ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti serta mengamati bagaimana akuntabilitas dan transparansi komunikasi

pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Instagram, Twitter, Tiktok dan juga Web instansi.

1.2 Rumusan Penelitian

1. Bagaimana Akuntabilitas Komunikasi Pemerintah melalui Media Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI?
2. Bagaimana Transparansi Komunikasi Pemerintah melalui Media Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Akuntabilitas Komunikasi Pemerintah melalui Media Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Menganalisis Transparansi Komunikasi Pemerintah melalui Media Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat teoritis dan praktis

1.4.1 Secara Teoritis

Peneliti mencoba menuangkan sedikit ilmu yang dimiliki agar dapat mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Kementerian Ketenagakerjaan RI

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi para peneliti atau menjadi bahan rujukan bagi para peneliti serta menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Administrasi Publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam melihat, memahami dan menelaah pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis memandang perlu mengemukakan dan menjelaskan sistematika penelitian yang merupakan kerangka dan pedoman penelitian. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Terdiri dari latar belakang penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis).

BAB II KAJIAN PUSTAKA:

Terdiri dari penelitian terdahulu, akuntabilitas (konsep dasar, macam-macam, aspek-aspek, pentingnya akuntabilitas, dan inikator), transparansi (konsep dasar, prinsip-prinsip, dimensi), komunikasi publik (pengertian, tujuan, karakteristik, proses, unsur, model perencanaan, faktor-faktor), media sosial pemerintahan (*digital governace*, pengertian, fungsi, karakteristik, jenis-jenis, birokrasi dan media sosial dan model-model pengelolaan media sosial pemerintahan), kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menerangkan sebuah metode penelitian yang digunakan dan menjelaskan sebuah pendekatan serta jenisnya. Kemudian penulis juga mengemukakan lokasi penelitian yang diteliti, bagaimana teknik pengumpulan datanya, serta teknik analisis data yang akan dipakai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menunjukkan gambaran umum latar penelitian (visi dan misi, tugas dan fungsi, media sosial Kemenaker RI, struktur organisasi) serta membahas dan menganilisi hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti menunjukkan kesimpulan hasil penelitian dari awal hingga akhir yang sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian serta menunjukkan saran untuk penelitian ini.

BAGIAN AKHIR TESIS

Bagian akhir dari tesis ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran yang terdiri dari pedoman wawancara, jawaban wawancara, foto dokumentasi.